

Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulan (*Maret, Juni, September dan Desember*) diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan **IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA (IPHI) Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-13.AHA.01.07 Tahun 2013, Tanggal 28 Januari 2013**, bertujuan sebagai wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan aneka permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia khususnya dan kalangan masyarakat pemerhati hukum pada umumnya.

Pembina

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HakAsasi Manusia

Pengarah

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Peneliti Hukum dan HakAsasi Manusia
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HakAsasi Manusia
Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Pemimpin Umum (*Editor in Chief*)

AhyarAri Gayo, S.H., M.H., APU (Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia)

PemimpinRedaksi

AhyarAri Gayo, S.H., M.H., APU (Hukum Islam, BALITBANGKUMHAM)

Anggota Dewan Redaksi (*Section Editor*)

Marulak Pardede, S.H., M.H., APU (Hukum Ekonomi BALITBANGKUMHAM)
Mosgan Situmorang, S.H., M.H (Hukum Perusahaan, BALITBANGKUMHAM)
Henry Donald Lb. Toruan, S.H., M.H (Hukum Perdata, BALITBANGKUMHAM)
Nevey VaridaAriani, SH., M.H (Hukum Pidana, BALITBANGKUMHAM)
Hardianto Djanggih, S.H, M.H. (Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar)
Muhaimin, S.H. (Hukum Pidana, BALITBANGKUMHAM)

Redaksi Pelaksana (*Journal Manager / Managing Editor / Proofreader*)

Fitriyani, S.H., M.Si.

Sekretaris (*Journal Manager / Copyeditor / Layout Editor*)

M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P
Ibnu Prasetyo, S.H

Penyunting Tata Bahasa dan Naskah (*Copyeditor*)

Lindung Budi Mulyawan, S.H.
B. Lora Christyanti, S.H., S.I.P.
Maria Lusyana br Ginting, S.A.P.
Ardyan Gilang Ramadhan, S.Sos.
Amirah Balqis, S.H.

Teknologi Sistem Informasi

Machyudhie, S.T.

Mochammad Arip, S.Kom.

Harysandy Permana, S.Kom.

Agus Priyatna, S.Kom.

MitraBestari (Reviewer)

1. Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H.
Hukum Acara Pidana pada Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah
2. Prof. Dr. Rianto Adi, S.H., M.A.
Sosiologi Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta
3. Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum.
Hukum Tata Negara, Ilmu Perundang-undangan, Hukum Konstitusi, Hukum Kelembagaan Negara, dan Hukum Pemerintahan Daerah pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan
4. Dr. Moh. Din, S.H., M.H.
Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Adat pada Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
5. Dr. Tri Hayati, S.H., M.H.
Hukum Administrasi pada Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta
6. Dr. Hadi Supratikta, M.M.
Peneliti Utama, Administrasi Publik dan Pembangunan pada Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri, Jakarta
7. Dr. Farhana S.H., M.A., M.Pd.
Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Djakarta, Jakarta

Alamat Redaksi:

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 4-5, Lantai 7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon (021) 2525015, Faksimili (021) 2526438

Email:

balitbangkumham@gmail.com

ejournaldejure@gmail.com

Percetakan PT Pohon Cahaya

Jalan Gedung Baru 18 Jakarta Barat 11440
Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340

Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual di bidang hukum berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritis, serta berbagai kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat redaksi.

Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman A4, diketik spasi rangkap di *submit* pada aplikasi *Open Journal System (OJS)* pada URL/website: ejournal.balitbangham.go.id

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	iii
ADVERTORIAL	v
KUMPULAN ABSTRAK	vii
Sanksi Administratif Terhadap Kepala Daerah yang Tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional (<i>Administrative Sanctions for Regional Heads who Do Not Perform National Strategic Programs</i>)	473 - 486
Wicipto Setiadi, Ali Imran Nasution	
Ratio Legis Kedudukan Hukum Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi (<i>Legal Ratio of the Litigant's Legal Standing in Judicial Review by the Constitutional Court</i>)	487 - 510
Dian Agung Wicaksono, Andy Omara	
Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi Di Indonesia (<i>Developing the Constitutional Morality of the Constitutional Justice in Indonesia</i>)	511 - 530
Tanto Lailam	
Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan terhadap Masyarakat Sekitar (<i>Legal Analysis of Corporate Social and Environmental Responsibility Towards Surrounding Communities</i>).....	531 - 544
Ridha Hidayat, Azhari Yahya, M. Adli, Yul Ernis	
Pemenuhan Hak Masyarakat Nelayan di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (<i>Rights Fulfilling the Fishermen Community from Covid-19 Infected Disease</i>).....	545 - 556
Faisal Riza, Zainuddin	
Rekonstruksi Penggunaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (<i>Reconstruction of the Use of Village Funds to Make Village Community Welfare</i>).....	557 - 572
Muhaimin	
Pembatalan Putusan Arbitrase (<i>Annulment of Arbitration Awards</i>).....	573 - 586
Mosgan Situmorang	
Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia (<i>Handling of Return of State Assets from Criminal Action of Corruption and Implementation of Anti-Corruption UN Convention on Indonesia</i>).....	587 - 604
Ulang Mangun Sosiawan	

De Jure

Penyelesaian Korupsi dengan Menggunakan *Restoratif Justice*
(*Corruption Settlement Using Justice Restoratives*)..... 605 - 617

Fuzi Narindrani

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(*Legal Protection of Children Victims from Criminal Actors of Sexual Violence*) 619 - 636

Diana Yusyanti

BIODATA PENULIS

PEDOMAN PENULISAN

ADVERTORIAL

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Jurnal Penelitian Hukum De Jure yang diterbitkan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bisa kembali menerbitkan Volume 20 Nomor 4 Desember 2020.

Penerbitan Jurnal Penelitian hukum De Jure Volume 20 Nomor 4 Desember 2020 ini, akan memuat 10 (sepuluh) tulisan dari berbagai Institusi Lembaga penelitian yang ada di Indonesia. Penyebaran *corona virus disease* 2019 (Covid-19) dengan jumlah kasus dan jumlah kematian telah meningkat luas lintas wilayah dan negara berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat. Perubahan tranformasi sosial itu diantaranya Pemenuhan Hak Masyarakat Nelayan Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang perlu mendapatkan perhatian serius untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat pesisir pantai sebagai sumber kehidupan.

Berkaitan dengan hal tersebut, redaksi Jurnal Penelitian De Jure dalam Volume 20 Nomor 4, Desember 2020, mengangkat tulisan diantaranya Penanganan Korupsi dan Penerapan Konvensi Anti Korupsi di Indonesia, *Ratio Legis* Kedudukan Hukum Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi, Rekonstruksi Penggunaan Dana Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa, Sanksi Administratif terhadap Kepala Daerah yang tidak menjalankan Program Strategis Nasional sebagai agenda yang perlu kita cermati bersama sebagai rangkaian atas adanya pemilihan kepala daerah serentak di beberapa daerah yang akan dilaksanakan pada bulan Desember ini.

Kami menyampaikan terimakasih kepada penulis yang telah memberikan kepercayaan kepada Jurnal Penelitian Hukum De Jure untuk menerbitkan hasil karyanya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para Mitra Bestari yang telah bersedia membantu, memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis dalam penerbitan ini.

Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI serta Ikatan Peneliti Hukum Indonesia yang telah berkenan dalam penerbitan Jurnal Penelitian Hukum De Jure ini.

Redaksi

Jakarta, Desember 2020

HALAMAN KOSONG

*The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge*

Wicipto Setiadi, Ali Imran Nasution

Administrative Sanctions for Regional Heads who Do Not Perform National Strategic Programs

Law Research Journal De Jure, 2020 Desember; Volume 20, Number 4, Page 473-486

The polemic about whether or not the president has authority to dismissed regional heads reappeared when the Government was proposing Draft Bill of Job Creation. Previously, it mentions that the president could dismiss regional head who not perform the National Strategic Programs. After it being forced into law, that provision not being included at the Job Creation Bill. However, the provision already exists in the Regional Government Act Number 23 the Year 2014 article 68. The questions that emerge in this research are the theoretical basis for dismissing regional heads and the procedure to dismiss regional heads who do not perform the national strategic programs. The research method used is normative legal research with the statutory approach and conceptual approach. The result of this study indicates that the theoretical principle for the imposition of administrative sanctions is the theory of the presidential system and the conception of welfare state adopted by Indonesia. Imposing sanctions is performed hierarchically by the non-litigation mechanism. It is necessary to regulate imposing sanctions by court mechanism to provide legal certainty and prevent abuse of power by the president.

Keywords: *national strategic programs; administrative sanction; dismissal; regional heads*

Dian Agung Wicaksono, Andy Omara

Legal Ratio of the Litigant's Legal Standing in Judicial Review by the Constitutional Court

Law Research Journal De Jure, 2020 Desember; Volume 20, Number 4, Page 487-510

The discourse regarding the dynamics of the Petitioner's legal standing in judicial review by the Constitutional Court is not an entirely new issue to be analyzed. However, the issue of the legal ratio of the Petitioner's legal standing in judicial review by the Constitutional Court is fundamental research that needs to be carried out to find out the historical aspects of the law regarding the Petitioner's legal standing in judicial review. The findings of this study are an inseparable part of legal research in doctoral degree regarding the dynamics of the Petitioner's legal standing in judicial review by the Constitutional Court. This research specifically answers the following questions: (a) What is the legal ratio of the actor qualifications as a Petitioner in the judicial review by the Constitutional Court? (b) What is the legal ratio of the Constitutional Court in formulating the conditions for constitutional injury of Petitioner in the judicial review? It is normative legal research, by analyzing secondary data in the form of statutory regulations, Constitutional Court decisions, and literature related to the doctrine of legal standing in judicial review. The study indicates that the legal ratio of the Petitioner qualifications in judicial review is developed from the Perma 2/2002, while the legal ratio of Petitioner's constitutional injury is based on the provisions of Art. 51 par. (1) of the Constitutional Court Act, expressis verbis, the doctrine of the objective theory of constitutional invalidity, the doctrine of a broad approach to standing, the doctrine of causation, and the doctrine of redressability from judicial practice in the United States.

Keywords: *legal ratio; legal standing; petitioner judicial review; constitutional court*

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Tanto Lailam

Developing the Constitutional Morality of the Constitutional Justice in Indonesia

Law Research Journal De Jure, 2020 Desember; Volume 20, Number 4, Page 511-530

The research is the constitutional morality of constitutional justice in an Indonesia post-reformation era. It causes the problems of independence, impartiality, and accountability. The purposes of this research to get the design of constitutional morality, and take apart – rearrange constitutional morality in Constitutional Court decisions and justice behaviour. The research method used is normative legal research by prioritizing secondary data, with a statute approach, philosophical approach, and a case approach. The data obtained were analyzed using descriptive qualitative methods. The results showed that the concept of constitutional morality must be contained in the state ideology of Pancasila and the 1945 Constitution. It is a category value of law and morality, principle of law and morality, and legal and moral norms. In decisions of the Constitutional Court use constitutional morality in its benchmarks, some decisions were less of the constitutional morality. Injustice behaviour, several cases of morality and law, cases of minor violations, such as the case of Arsyad Sanusi and the case of Arief Hidayat. Cases of serious violations, such as the case of Akil Mochtar and the case of Patrialis Akbar. It is necessary to apply constitutional morality in the process of recruitment and accountability of constitutional justice by sharpening the dimensions of constitutional morality, namely: conditions of being obedient to God Almighty, the integrity of judges and good character (akhlak mulia).

Keywords: constitutional morality; constitutional justice; constitutional court

Ridha Hidayat, Azhari Yahya, M. Adli, Yul Ernis

Legal Analysis of Corporate Social and Environmental Responsibility Towards Surrounding Communities

Law Research Journal De Jure, 2020 Desember; Volume 20, Number 4, Page 531-544

Corporate social and environmental responsibility has been regulated in some laws; however, there is no uniformity among the laws. This article aims to analyze regulations on corporate social and environmental responsibility based on Indonesian laws. The method used for this study is normative juridical methods by using the legal approach. Data required for research were collected through library research by analyzing primary and secondary legal resources related to the study. Collected data were analyzed by using qualitative analysis. The results show that corporate social and environmental responsibility is enacted in some laws, among others Law Number 25 of 2007 and Law Number 40 of 2007. However, there is no uniformity in this enactment so that it causes legal uncertainty for the company. The other impact that resulted from this condition is that the ineffective implementation of corporate social and environmental responsibility. Besides, this matter may also open an opportunity for the company to make the wrong interpretation of corporate social and environmental responsibility which is less effective. Therefore, it is recommended that the Government should immediately enact a new law on corporate social and environmental responsibility which is more consistent and complete to create legal certainty for the company and useful for surrounding communities.

Keywords: responsibility; social, environmental; corporate

**The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

Faisal Riza, Zainuddin

Rights Fulfilling the Fishermen Community from Covid-19 Infected Disease

Law Research Journal De Jure, 2020 Desember; Volume 20, Number 4, Page 545-556

The spread of the Covid-19 infectious disease epidemic was so rapid that it reached the territory of Indonesia, including Medan City. The fishing community also felt the impact of Covid-19. Earnings are reduced, fishing companies are closed, and the fish market is quiet because of concern over contracting the virus. The dilemma of fishermen's activities is that if they do not go to sea, their daily needs are threatened. Otherwise, if they are out of the house, they are worried about contracting the virus. Fishers are a community group that is difficult to get access to legal information, so their protection is always neglected and does not get legal certainty. Patterns of life tend to be unhealthy, leaving fishers vulnerable to disease. Concerned that the virus will infect fishing communities, it is necessary to study how to protect fishers from outbreaks of infectious diseases and how their obstacles. Purpose of this study was to find out about the protection of fishing communities from the contagious epidemic of Covid-19 and its obstacles. In order to achieve this goal, the method applied is normatively through an empirical approach with qualitative data analysis. Some regulations provide guaranteed welfare and health protection for fishing communities, namely Law Nomor 7 of 2016, Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Nomor 18 of 2016, Presidential Instruction Nomor 15 of 2011. Against the protection of disease outbreaks namely Law Nomor 4 of 1984, Law Nomor 6 of 2018 and Medan Mayor Regulation Nomor 11 of 2020. These rules were conveyed to the fishing community.

Keywords: rights fulfilling; fishers; pandemic

Muhaimin

Reconstruction of the Use of Village Funds to Make Village Community Welfare

Law Research Journal De Jure, 2020 Desember; Volume 20, Number 4, Page 557-572

The diversity of characteristics and types of villages, or as other names (other than villages) did not prevent the founding fathers from making their choice to form a unitary state. The regulation regarding the Village cannot accommodate all the interests and needs of the Village community, which up to now has numbered around 73,000 (seventy-three thousand) Villages and around 8,000 (eight thousand) kelurahan. Besides, the implementation of Village regulations that have so far been in effect is no longer in line with the times, especially concerning the position of customary law communities, democratization, diversity, community participation, as well as progress and equitable development to cause disparities between regions, poverty and social problems. The culture can disturb integrity the Unitary State of the Republic of Indonesia. The formulation of the problem of this scientific paper is "How to reconstruct the use of village funds to realize the welfare of village communities?" Using normative juridical research methods, statute approach. Several things that can be identified are related to the clarity of position and strengthening of village existence, in Law Number 6 of 2014 is a matter of defining villages. There is one fundamental difference compared to the previous law (Law Number 32 of 2004), namely the inclusion of a clause "community initiative" which means that there are an expansion and strengthening of autonomy in the management of the village area. The use of Village Funds is managed through a participatory development mechanism by placing the Village community as the subject of development. Therefore, the plan to use the Village Fund must be discussed and agreed upon in the Village deliberation.

Keywords: reconstruction; village fund; village public; well being

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Mosgan Situmorang

Annulment of Arbitration Awards

Law Research Journal De Jure, 2020 Desember; Volume 20, Number 4, Page 573-586

An arbitration award is final and binding, meaning that legal action in the form of appeal and cassation cannot be made against the award. In anticipation of the possible error or injustice in the arbitration award, a clause in the law that regulates the annulment of the arbitral award is drawn up. Annulment of an arbitration award is a control mechanism against the possibility of the arbitrator and the parties' mistakes, whether intentional or unintentional. With the annulment clause in the law, cause in the award is not absolute. It is understandable because after all the arbitrator examining an arbitration case may make a mistake, and there must be a mechanism to make corrections to the error. The purpose of the clause to annul an arbitration award is good. However, in its implementation, it is often used by parties, especially those who lose in bad faith, namely to delay or delay the implementation of an arbitration award. To find out more about the annulment of an arbitration award is necessary to conduct a study. The problems examined in this research are, first, how is the arrangement of arbitration annulment in several regulations in force in Indonesia and second, what are the consequences of the annulment clause of an arbitration award. The method used in this research is juridical normative, namely by using secondary data, in the form of books, research results, journals, and legislation, including international conventions. The conclusion obtained in this study is that the conditions for annulment contained in the arbitration law, namely Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution are narrower when compared to the conditions for annulment of an arbitration award in several other regulations. Based on this conclusion, it is suggested that the clause regarding the annulment of arbitration be revised.

Keywords: *arbitration; annulment of award*

Ulang Mangun Sosiawan

Handling of Return of State Assets from Criminal Action of Corruption and Implementation of Anti-Corruption Un Convention on Indonesia

Law Research Journal De Jure, 2020 Desember; Volume 20, Number 4, Page 587-604

Corruption crimes are a threat to democratic principles, which lead to high transparency, accountability and integrity, as well as the security and stability of the Indonesian nation. Therefore, corruption is a criminal act that is systemic in nature and detrimental to sustainable development, so it requires handling efforts, which are comprehensive, systematic, and sustainable. So it is a special regulation that needed to return the assets resulting from corruption. The problem is how to handle the return of state assets and its implementation through criminal channels in Indonesia. The purpose of this study was to determine the handling and application of asset returns through criminal channels following the provisions of the 2003 KAK. This study used juridical normative and empirical juridical research methods with descriptive qualitative research characteristics. From the discussion, it is concluded that the process of handling the return of state assets resulting from corruption can be carried out through a criminal route through four stages, namely asset tracking, asset freezing, asset confiscation and asset return and transfer. Meanwhile, the application of the basic principles of KAK 2003 in Indonesia in recovering assets takes steps in the form of prevention, criminalization and law enforcement, international cooperation, technical assistance and information exchange, Illicit Enrichment and asset recovery, which have been recognized by many as a major breakthrough and at the same time a basic principle of UNCAC. Suggestions need to formulate a Law on the Return of Assets from Corruption in Indonesia.

Keywords: *corruption; handling; application; un; convention; corruption*

*The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge*

Fuzi Narindrani

Corruption Settlement Using Justice Restoratives

Law Research Journal De Jure, 2020 Desember; Volume 20, Number 4, Page 605-617

The rise in criminal acts of corruption, especially those committed by state officials, has increasingly filled society with stigmatic stereotypes. The demand for the seriousness of the Government in tackling criminal acts of corruption in Indonesia, seems to have been increasing recently, especially with the emergence of reports related to several law enforcers accused of committing despicable acts, extortion and abuse of authority. Some people still think that only repressive actions can be overcome corruption because according to their understanding, repressive actions can provide deterrence against corrupt practices or behaviour. The current social, economic and political conditions have provided room for massive, systematic and structured corruption in various lines of life, including in State institutions, Government agencies, State-Owned Enterprises or Region-Owned Enterprises, Banking and Service institutions. Finance and various other sectors of community life. The formulation of the problem in this scientific paper is "Why doesn't the resolution of corruption cases in Indonesia currently use restorative justice?" The method is a normative juridical approach. The corruption eradication policy adopted through an integral-systemic policy aims to ensure that there is an integration between the crime prevention policy and the overall system development policy. The eradication of criminal acts of corruption that is pursued with an integral-systemic policy, the aim is to ensure that there is an integration between the crime prevention policy and the overall system development policy. Integration and systemic steps in eradicating corruption, both repressively and preventively, need to be synergized, given that repressive actions alone in dealing with the characteristics and dimensions of corruption have not yet been tested for their effectiveness.

Keywords: criminal act; corruption; justice restoratives

Diana Yusyanti

Legal Protection of Children Victims from Criminal Actors of Sexual Violence

Law Research Journal De Jure, 2020 Desember; Volume 20, Number 4, Page 619-636

Cases of sexual violence against children at the time of the Covid-19 pandemic continued to increase, both perpetrators of sexual violence against girls and boys perpetrated by paedophiles and also by child prostitution businesses, even though Law Number 35 Tahun 2014 and Law Number 17 of 2016 concerning child protection which further exacerbates the sanctions for the perpetrators, apparently they have not had a deterrent effect. The research method used in this paper is to use normative legal research methods through the statutory approach. The conclusion is that in handling cases of sexual violence against children, law enforcers often use the Criminal Code (KUHP), even though the Child Protection Law can provide better protection for children as victims compared to the Criminal Code because the KUHP has not regulated rights. -the rights of children as victims to obtain legal guarantees that can alleviate losses due to sexual violence and the perpetrators of very light penalties as stipulated in the Child Protection Law. Apart from that, the existence of children that have been regulated in the Criminal Code and several laws and regulations have similar similarity in the category of child age limits. For this reason, it is suggested to formulate rules in the Criminal Code concerning sanctions for perpetrators of sexual violence and legal guarantees for children as victims. Besides, there should be uniform rules regarding the age limit of children.

Keywords: legal protection; children as victims; sexual violence

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya**

Wicipto Setiadi, Ali Imran Nasution (Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)

Sanksi Administratif Terhadap Kepala Daerah yang Tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 4, Desember 2020, Halaman 473-486

Polemik tentang Presiden berwenang atau tidak berwenang memberhentikan kepala daerah muncul kembali saat pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Disebutkan sebelumnya di dalam draft Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bahwa Presiden dapat memberhentikan kepala daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional. Setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang, rumusan tersebut tidak dicantumkan. Namun demikian, rumusan Pasal tersebut sudah ada di dalam ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah apa dasar teoretis Presiden berwenang memberhentikan kepala daerah dan bagaimana tata cara pemberhentian kepala daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar teori penjatuhan sanksi administratif adalah berdasarkan teori sistem pemerintahan presidensial dan konsepsi negara kesejahteraan yang dianut oleh Indonesia. Prosedur pemberian sanksi ini dilakukan secara hierarkis melalui jalur non-pengadilan. Perlu dibuat aturan pemberian sanksi melalui jalur pengadilan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah munculnya penyalahgunaan wewenang oleh Presiden.

Kata Kunci: program strategis nasional; sanksi administratif; pemberhentian; kepala daerah

Dian Agung Wicaksono, Andy Omara (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

Ratio Legis Kedudukan Hukum Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 4, Desember 2020, Halaman 487-510

Penelitian mengenai ratio legis kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian UU merupakan penelitian fundamental yang perlu untuk dilakukan dalam rangka mengetahui aspek sejarah hukum mengenai asal usul pengaturan mengenai kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian UU. Temuan dari penelitian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penelitian hukum dalam studi doktoral mengenai dinamika kedudukan hukum Pemohon pada pengujian UU oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini secara spesifik menjawab pertanyaan: (a) Apa ratio legis dari pengaturan kualifikasi aktor sebagai Pemohon pada pengujian UU? (b) Apa ratio legis dari Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan syarat kerugian konstitusional Pemohon pada pengujian UU? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur yang terkait dengan doktrin kedudukan hukum dalam pengujian UU. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ratio legis dari pengaturan kualifikasi aktor sebagai Pemohon pada pengujian UU sejatinya merupakan rumusan yang dikembangkan dari PerMA 2/2002, sedangkan ratio legis dari Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan syarat kerugian konstitusional didasarkan pada: (a) ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK secara *expressis verbis*; (b) doktrin the objective theory of constitutional invalidity dan doktrin a broad approach to standing; serta (c) doktrin causation dan doktrin redressability dari praktik peradilan di Amerika Serikat.

Kata Kunci: ratio legis; kedudukan hukum; pemohon; pengujian undang-undang; mahkamah konstitusi

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya****Tanto Lailam (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul)****Membangun *Constitutional Morality* Hakim Konstitusi di Indonesia**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 4, Desember 2020, Halaman 511-530

Penelitian ini mengenai constitutional morality hakim konstitusi pasca reformasi di Indonesia yang menimbulkan persoalan independensi, imparialitas dan akuntabilitas peradilan. Tujuan dalam penelitian ini adalah memberikan desain konstruksi moralitas konstitusi, sekaligus membongkar dan menata kembali constitutional morality dalam putusan MK dan perilaku hakim konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengutamakan data sekunder, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bangunan moralitas terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, baik dalam kategori nilai (nilai hukum dan moral), asas/prinsip, kategori norma/ kaidah (norma hukum dan norma moral). Dalam putusan MK, moralitas konstitusi digunakan sebagai tolok ukurnya, sekalipun faktanya ada beberapa putusan yang kering dari moralitas konstitusi. Dalam konteks perilaku hakim, beberapa kasus terjadi, kasus kategori pelanggaran ringan, seperti: kasus Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi, kasus Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Kasus pelanggaran berat, seperti: kasus Akil Mochtar dan kasus Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Sehingga kedepan, perlu penguatan moralitas konstitusi dalam proses rekrutmen dan akuntabilitas hakim konstitusi dengan mempertajam dimensi moralitas konstitusi, misalnya syarat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, syarat integritas hakim dan syarat berakhlak mulia.

Kata Kunci: moralitas konstitusi, hakim, mahkamah konstitusi**Ridha Hidayat, Azhari Yahya, M. Adli, Yul Ernis (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Jakarta)****Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan terhadap Masyarakat Sekitar**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 4, Desember 2020, Halaman 531-544

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan namun pengaturan tersebut belum ada keseragaman antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan untuk penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan menganalisis bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terdapat dalam beberapa peraturan Perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Akan tetapi pengaturan tersebut masih belum seragam sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Dampak lainnya yang timbul dari ketidakseragaman ini adalah tidak efektifnya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan. Selanjutnya ketidakseragaman pengaturan tersebut juga dapat membuka celah bagi perusahaan untuk menafsirkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara tidak tepat dan kurang efektif. Oleh karena itu disarankan agar pemerintah segera menutup celah kekurangan regulasi tersebut dengan membuat aturan baru yang lebih konsisten dan lengkap untuk terciptanya kepastian hukum bagi perusahaan dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Kata Kunci: tanggung jawab; sosial; lingkungan; perusahaan

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya****Faisal Riza, Zainuddin (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)****Pemenuhan Hak Masyarakat Nelayan di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 4, Desember 2020, Halaman 545-556

Penyebaran wabah penyakit menular Covid-19 begitu cepat hingga ke wilayah Indonesia termasuk Kota Medan. Dampak Covid-19 juga dirasakan oleh masyarakat nelayan. Penghasilan berkurang, perusahaan perikanan tutup dan pasar ikan sepi hal itu karena kekhawatiran terjangkit virus. Dilematis aktivitas nelayan, jika tidak melaut kebutuhan sehari-hari terancam, sebaliknya jika keluar rumah khawatir terjangkit virus. Nelayan merupakan kelompok masyarakat sulit mendapatkan akses informasi hukum, sehingga perlindungan terhadap dirinya selalu abai dan tidak mendapat kepastian hukum. Pola hidup cenderung tidak sehat menyebabkan nelayan rentan terhadap penyakit. Kekhawatiran virus akan menjangkit masyarakat nelayan, maka perlu dikaji bagaimana melindungi nelayan dari wabah penyakit menular dan bagaimana hambatanannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang perlindungan terhadap masyarakat nelayan dari wabah penyakit menular covid-19 dan hambatanannya. Agar tujuan ini tercapai maka metode yang diterapkan adalah secara normatif melalui pendekatan empiris dengan analisis data secara kualitatif. Beberapa peraturan memberikan jaminan perlindungan kesejahteraan dan kesehatan bagi masyarakat nelayan, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016, Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011. Terhadap perlindungan wabah penyakit yaitu UU Nomor 4 Tahun 1984, UU Nomor 6 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Medan Nomor 11 Tahun 2020. Aturan tersebut disampaikan kepada masyarakat nelayan.

Kata Kunci: pemenuhan hak; nelayan; pandemic**Muhaimin (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Jakarta)****Rekonstruksi Penggunaan Dana Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 4, Desember 2020, Halaman 557-572

Keberagaman karakteristik dan jenis desa, atau dengan sebutan lain (selain desa) tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat memwadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rumusan masalah karya ilmiah ini adalah “Bagaimana rekonstruksi penggunaan dana desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa?” Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Beberapa hal yang dapat diidentifikasi berkaitan kejelasan kedudukan dan penguatan eksistensi desa, dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 ialah soal pendefinisian desa. Ada satu perbedaan cukup mendasar dibanding undang-undang sebelumnya (UU Nomor 32 Tahun 2004), yakni dicantumkannya klausul “prakarsa masyarakat” yang berarti ada perluasan sekaligus penguatan terhadap otonomi dalam pengelolaan dana desa. Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

Kata Kunci: rekonstruksi; dana desa; masyarakat desa; kesejahteraan

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya**

Mosgan Situmorang (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta)

Pembatalan Putusan Arbitrase

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 4, Desember 2020, Halaman 573-586

Putusan arbitrase bersifat *final and binding* artinya terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum. Sebagai antisipasi terhadap kemungkinan kesalahan dalam putusan arbitrase maka dibuatlah suatu klausul dalam undang-undang yang mengatur pembatalan putusan arbitrase. Pembatalan adalah suatu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan kesalahan arbiter maupun para pihak. Dengan adanya aturan pembatalan dalam undang-undang maka putusan tidak bersifat mutlak. Di dalam pelaksanaannya disinyalir sering dipergunakan oleh para pihak, khususnya yang kalah untuk menunda atau mengulur waktu pelaksanaan suatu putusan arbitrase. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pembatalan putusan arbitrase maka perlu dilakukan suatu penelitian. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah, pertama bagaimanakah pengaturan pembatalan arbitrase dalam beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia dan yang kedua apa akibat yang timbul dengan adanya klausul pembatalan putusan arbitrase. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah normatif yuridis yakni dengan menggunakan data sekunder. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa syarat pembatalan yang terdapat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lebih sempit bila dibandingkan dengan syarat pembatalan putusan arbitrase dalam beberapa peraturan lainnya dan akibat adanya klausula pembatalan maka di satu sisi kesalahan dalam putusan arbitrase dapat dihindari akan tetapi juga memperlambat pelaksanaan putusan, apabila ada gugatan. Berdasarkan kesimpulan ini disarankan agar klausul mengenai pembatalan arbitrase direvisi.

Kata Kunci: arbitrase; pembatalan putusan

Ulang Mangun Sosiawan (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta)

Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 4, Desember 2020, Halaman 587-604

Kejahatan korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi trnaspansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistemik dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan upaya penanganan, yang bersifat menyeluruh, sistimatis, dan berkesinambungan. Sehingga diperlukan peraturan khusus untuk mengembalikan asset hasil tindak pidana korupsi. Permasalahannya, adalah bagaimana penanganan pengembalian asset negara dan penerapannya melalui jalur pidana di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penanganan dan penerapan pengembalian asset melalui jalur pidana sesuai ketentuan KAK 2003. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Dari hasil pembahasan menyimpulkan bahwa proses penanganan pengembalian asset negara hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana melalui empat tahapan, yaitu pelacakan asset, pembekuan asset, penyitaan aset dan pengembalian dan penyerahan asset. Sedangkan penerapan prinsip dasar KAK 2003 di Indonesia dalam pengembalian aset dilakukan langkah-langkah berupa tindakan pencegahan, kriminalisasi dan penegakan hukum, kerjasama internasional, bantuan teknis dan pertukaran informasi, Illicit Enrichment dan pengembalian asset (Asset Recovery), yang telah diakui oleh banyak pihak sebagai sebuah terobosan besar dan sekaligus merupakan prinsip dasar UNCAC. Saran perlu pembentukan Undang-Undang tentang Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: korupsi; penanganan; penerapan; konvensi; PBB; anti korupsi

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya**

Fuzi Narindrani (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Jakarta)

Penyelesaian Korupsi dengan Menggunakan *Restoratif Justice*

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 4, Desember 2020, Halaman 605-617

Maraknya tindak pidana korupsi, terutama yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, semakin membuat masyarakat penuh dengan stereotip stigmatis. Tuntutan terhadap keseriusan Pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia, sepertinya akhir-akhir ini semakin marak, lebih-lebih dengan mencuatnya pemberitaan terkait dengan beberapa oknum Penegak Hukum yang dituding melakukan perbuatan tercela, melakukan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang. Sebagian masyarakat, masih menganggap hanya dengan tindakan represif korupsi dapat ditanggulangi, karena menurut pemahaman mereka tindakan represif tersebut dapat memberikan daya tangkal terhadap praktik atau perilaku koruptif. Kondisi sosial, ekonomi dan politik saat ini telah memberi ruang gerak korupsi secara masif, sistematis dan terstruktur di berbagai lini kehidupan, termasuk pada lembaga-lembaga Negara, lembaga-lembaga Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, lembaga Perbankan dan Jasa Keuangan serta diberbagai sektor kehidupan masyarakat lainnya. Perumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah “Mengapa penyelesaian kasus korupsi saat ini di Indonesia tidak menggunakan *restoratif justice*?” Metode adalah pendekatan yuridis normatif. Kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditempuh dengan kebijakan integral-sistemik, tujuannya agar adanya keterpaduan antara kebijakan penanggulangan kejahatan dengan keseluruhan kebijakan pembangunan sistem. pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditempuh dengan kebijakan integral-sistemik, tujuannya agar adanya keterpaduan antara kebijakan penanggulangan kejahatan dengan keseluruhan kebijakan pembangunan sistem. Langkah integral dan sistemik dalam pemberantasan korupsi, baik secara represif dan preventif perlu disinergikan, mengingat tindakan represif saja dalam menghadapi karakteristik dan dimensi korupsi belum teruji efektivitasnya.

Kata Kunci: tindak pidana; korupsi; *restoratif justice*

Diana Yusyanti (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta)

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 4, Desember 2020, Halaman 619-636

Kasus kekerasan seksual terhadap anak pada saat pandemi Covid-19 terus meningkat, baik itu pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan maupun anak laki-laki yang dilakukan oleh pelaku kaum pedofil dan juga oleh pelaku bisnis prostitusi anak, meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak yang lebih memperberat sanksi bagi pelaku, ternyata belum juga mempunyai efek jera. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui pendekatan Perundang-undangan. Kesimpulannya bahwa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, penegak hukum seringkali menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), padahal dalam Undang-undang Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak sebagai korban dibandingkan dengan KUHP, karena dalam KUHP belum diatur hak-hak anak sebagai korban dalam memperoleh jaminan hukum yang dapat meringankan kerugian akibat kekerasan seksual dan pelaku sanksinya sangat ringan seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan anak. Selain itu keberadaan anak yang telah diatur dalam KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan tidak ada kesamaan dalam kategori batasan umur anak. Untuk itu disarankan perlu dibentuk aturan dalam KUHP tentang sanksi bagi pelaku kekerasan seksual serta jaminan hukum bagi anak sebagai korban. Selain itu perlu ada aturan yang seragam tentang batasan usia anak.

Kata Kunci: perlindungan hukum; anak sebagai korban; kekerasan seksual